Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

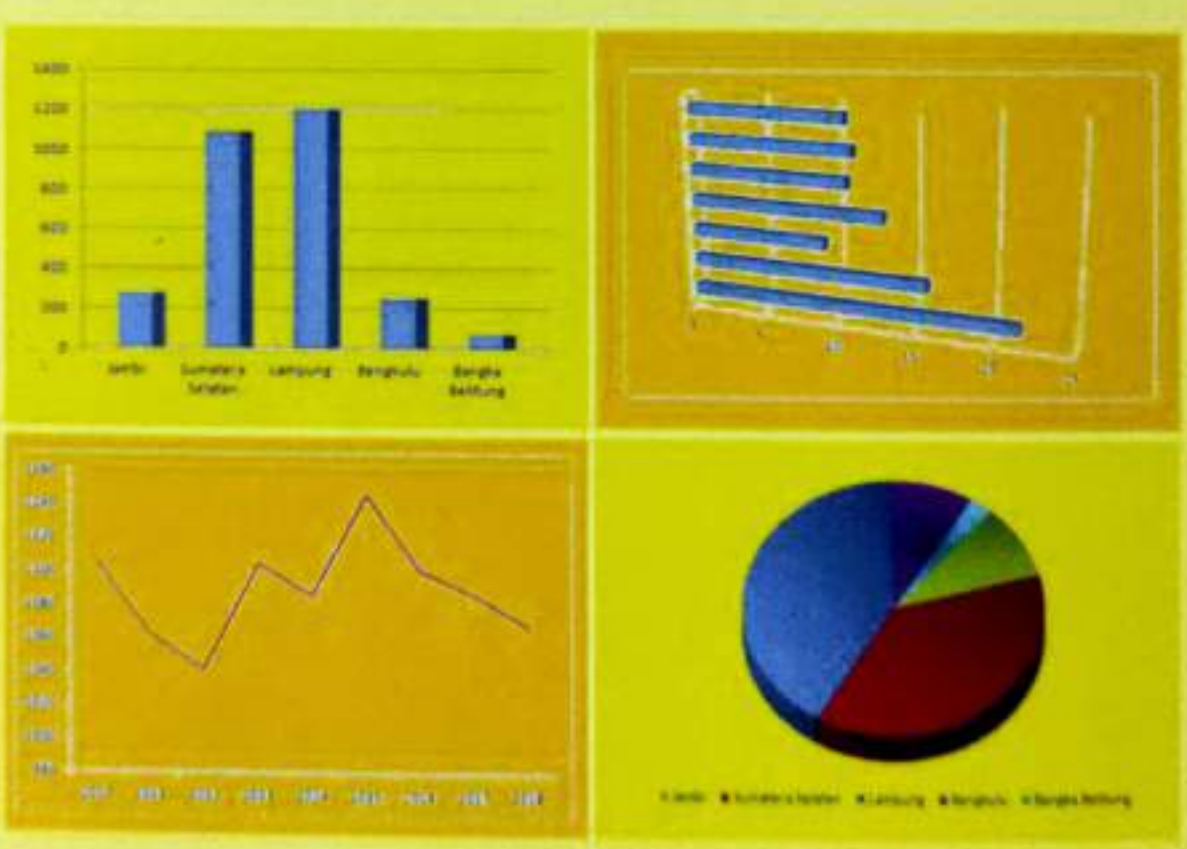

UNSRI PRESS

Editor : Imelda, S.E., M.S.E

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Tim Penulis

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2021
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting cover: Anggita Feisabella Rizanti
Setting & Lay Out Isi : Devi
Cetakan Pertama, Januari 2021
xiv + 252 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-913-8

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN v

KATA PENGANTAR vii

BAB I Analisis Ekonomi Daerah

Imelda, M. Deassy Apriani, Anggita Feisabella Rizanti,

Mega Debiyanti 1

BAB II Analisis Keuangan Daerah

Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini 43

BAB III Lingkungan dan Pembangunan

Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto,

Ichsan Hamidi 79

BAB IV Upah Pekerja: Determinan dan Struktur

Yunisvita 103

BAB V Aglomerasi Industri: Telaah Prospek Untuk Industri

Kecil di Sumatera Selatan

Mukhlis, Bernadette Robiani, Dirta Pratama Atiyatna,

Hamira 151

BAB VI Efisiensi Perbankan

Suhel 181

BAB VII Perkembangan Inklusi Keuangan Sumatera Selatan

Sri Andaiyani dan Ariodillah Hidayat 217

BAB VIII Dana Desa: Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan

Pengembangan Wilayah

Sukanto, Azwardi, Wika Indriyani 227

BAB III
LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

Oleh:

Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto, Ichsan Hamidi

1. Pendahuluan

Memahami hubungan antara Lingkungan dan Pembangunan tidak cukup hanya melihat data, informasi dan pengetahuan, tetapi juga harus dapat menjelaskan hubungan dan konsekuensi secara mendalam untuk menemukan solusi kebijakan dan kemungkinan program kegiatan untuk mendorong pembangunan. Secara umum, dalam literatur ekonomi pembangunan pembangunan terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Indikator dasar yang digunakan untuk pembangunan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang didefinisikan sebagai ukuran agregat produksi yang sama dengan jumlah nilai bruto yang ditambahkan dari semua sektor dan unit kelembagaan yang terlibat dalam produksi tersebut. Sementara itu, lingkungan juga dapat dipahami melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, hutan, minyak bumi, batubara dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan. Persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan lingkungan adalah bagaimana mengelola dan mengalokasikan SDA tesebut agar dapat

menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan tersebut.

Dalam literatur ilmu ekonomi SDA, untuk memahami konsep sumber daya alam ada dua hal penting yang perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan pengertian antara sumber daya alam dan barang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang masih terdapat dalam ataupun diluar bumi yang masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya kebutuhan manusia. Sementara barang sumber daya alam adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari tempat tersedianya dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor produksi lain untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pandangan Rees (1990) dalam bukunya menjelaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai barang sumber daya alam harus memiliki dua kriteria, yaitu: (1) harus ada pengetahuan, teknologi atau ketrampilan untuk memanfaatkannya; dan (2) harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya alam tersebut. Apabila kedua kriteria tersebut tidak dimiliki, maka sesuatu tersebut disebut dengan barang netral. Sebagai contoh, tambang emas yang terkandung dalam bumi, apabila belum memiliki pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkannya dan tidak ada permintaan, maka tambang emas tersebut masih dalam kriteria barang netral. Namun pada saat ada permintaan dan teknologi tersedia, maka menjadi barang sumber daya alam.

Pengelolaan SDA merupakan suatu intervensi publik yang sistematis dalam jangka Panjang, sehingga dalam pengalokasian dan pemanfaatan SDA juga harus dapat dikontrol oleh pemerintah dan

mekanisme pasar, hal ini dimaksudkan supaya kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial (kegagalan pasar) yang akan terjadi dapat diminimalisir. Sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas dan mengalami kerusakan merupakan suatu kendala bagi berlangsungnya pembangunan. Untuk menangani persoalan tersebut tentu harus mendapatkan perhatian yang serius bagi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia internasional, karena apabila tidak dilakukan dengan serius justru akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu sangatlah penting melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam agar dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati lebih hati-hati dan sangat diperlukan bagi pembangunan.

Kebijakan pembangunan dan aspek lingkungan seringkali tidak sejalan, hal ini bertolak belakang dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konferensi mengenai Lingkungan dan Mahluk hidup di Stockholm pada 1972. Pada pertemuan itulah untuk pertama kalinya secara luas seluruh perwakilan dari berbagai negara di dunia menekankan perlunya memperhitungkan aspek lingkungan pada program-program pembangunan yang selama ini dijalankan. Pada pertemuan menghasilkan pemikiran yang pro-kontra antara negara maju dan berkembang, terutama bagi negara-negara berkembang yang beranggapan bahwa isu lingkungan ini merupakan akal-akalan negara maju untuk menghindar dari tuntutan agar negara maju membantu negara berkembang dengan menyumbang sebesar 0,7 persen dari

Produk Domestik Bruto (PDB) negara maju untuk negara berkembang (Salim, 2010).

Masalah lingkungan di dalam ranah ekonomi dapat ditinjau melalui model aliran melingkar atau model keseimbangan material yang merupakan konsep dasar interaksi antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Selain itu, teori transisi lingkungan perkotaan juga dapat menjadi dasar untuk mengungkapkan hubungan antara lingkungan dan pembangunan di tingkat perkotaan, teori ini menekankan pada interaksi rumah tangga melalui sektor konsumsi dan produksi terhadap lingkungan, pada pada gilirannya menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan yang lebih tinggi. Selanjutnya masalah lingkungan juga dapat ditinjau dari teori eksternalitas yang secara khusus memperhitungkan dengan tepat konsekuensi lingkungan dari sebuah kegiatan ekonomi. Titik awal untuk mengembangkan landasan kesejahteraan secara teoritis dalam ekonomi lingkungan adalah dengan memahami definisi kriteria normatif yang dapat digunakan untuk menilai keinginan dari hasil ekonomi yang berbeda. Kriteria yang dapat gunakan adalah optimalitas Pareto, yang memiliki keutamaan dan kelemahan sebagai dasar normatif untuk rekomendasi kebijakan.

Tantangan kedepan bagaimana kebijakan pembangunan dalam memanfaatkan lingkungan dan mengelolah sumber daya alam tersebut. Dalam memahami hal tersebut titik awalnya adalah apakah aktivitas pembangunan memiliki pengaruh langsung terhadap lingkungan. Fungsi pertanyaan tersebut adalah untuk menganalogikan jenis masalah yang dipertimbangkan dalam ekonomi lingkungan dan

petunjuk pada aspek studi positif dan normatif. Dari sudut pandang positif yakni memahami bagaimana struktur kelembagaan yang ada dapat menyebabkan para pelaku ekonomi yang berkepentingan secara mandiri untuk melakukan tindakan yang memiliki konsekuensi negatif bagi pihak lain. Sementara, pendapat dari perspektif normatif menyarankan adanya intervensi kebijakan dari pemerintah yang dapat membantu mengurangi konsekuensi tersebut.

2. Hubungan antara Lingkungan dan Pembangunan

Interaksi ini dapat dicirikan sebagai salah satu saling ketergantungan. Sebagaimana pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa kondisi lingkungan yang baik, demikian pula kualitas lingkungan tidak dapat dipertahankan di wilayah yang dihuni atau dieksploitasi secara intensif tanpa pembangunan berkelanjutan. Apabila memandang pembangunan secara sempit hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, maka kualitas lingkungan secara umum tidak terlalu menjadi masalah karena kelimpahan, kualitas dan aksesibilitas sumber daya alam untuk bahan baku dan energi sebagai pusat perekonomian. Jika kita memahami pembangunan secara lebih luas, misalnya dalam arti pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan dan kondisi berkelanjutan akan menjadi salah satu prioritas utama. Dalam hal ini, pelestarian kelestarian lingkungan jangka panjang atau pada akhirnya perbaikan kondisinya (dalam kasus kerusakan masa lalu) akan menjadi pusat perhatian.

Kondisi atau kualitas lingkungan setelah atau selama pelaksanaan program pembangunan dapat memberikan dampak

terhadap lingkungan. Pelaksanaan program atau proyek pembangunan dapat berdampak negatif dan positif terhadap lingkungan. Adapun contoh dari dampak tersebut dan pengaruhnya adalah:

(1). Dampak negatif dari program pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan air besar, kota; penambangan sumber daya alam dari bahan mentah dan energi dan lain-lain. Program pembangunan tersebut dapat memberikan pengaruh seperti fragmentasi habitat alami; hilangnya tanah subur; deforestasi dan degradasi tanah; pencemaran lingkungan; perubahan iklim lokal dan lain-lain.

(2). Dampak positif dari program pembangunan bendungan air yang lebih kecil; penerapan teknologi ramah lingkungan dan lain-lain. Pengaruh dari implementasi program tersebut dapat meningkatkan keanekaragaman hayati; pengayaan lanskap dengan fitur budaya; eksploitasi lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Lingkungan merupakan salah satu determinan penting yang mempengaruhi kemungkinan pembangunan. Diketahui secara empiris bahwa berbagai strategi pembangunan harus diterapkan di perkotaan, industri, dan pedesaan. Pendekatan pembangunan yang berbeda harus ditentukan sesuai dengan kondisi geografi wilayah seperti di daerah daratan, pesisir, pegunungan, dan dataran rendah. Jenis ekosistem dan iklim wilayah juga menjadi faktor penting dalam menentukan program pembangunan. Selain itu, faktor yang juga paling menentukan kebijakan dan program pembangunan adalah:

(1). Zona iklim (tropis, subtropis, zona sedang);

(2). Faktor fisik-geografi dasar (misalnya ketinggian di atas permukaan laut, curah hujan, suhu);

(3). Kualitas lingkungan (misalnya tingkat polusi, kepadatan penduduk, perluasan area yang gundul, tingkat degradasi tanah dan penggurunan);

(4). Kualitas dan kesuburan tanah, kualitas dan kuantitas sumber daya bahan baku dan energi, aksesibilitas sumber daya air minum berkelanjutan, dan sejenisnya.

Pembangunan ekonomi dapat diikuti juga oleh perkembangan industrialisasi, infrastruktur, dan aktivitas manusia sangat erat kaitannya dengan penurunan kualitas lingkungan yang sekaligus dapat merubah bentuk fisik atau kawasan suatu wilayah (Misra, 2014 dan Patz *et al.*, 2003). Aktivitas tersebut secara langsung dapat meningkatkan kebutuhan energi. Sementara aktivitas manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (kesejahteraan) seringkali mengabaikan dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Bahkan lebih jauh dapat mengakibatkan terjadinya deforestasi atau kehilangan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta terjadinya erosi tanah. Pada saat fungsi komponen-komponen lingkungan tersebut hilang, maka mengakibatkan terjadinya bencana alam dan tingginya tingkat polusi pada suatu kawasan. Beberapa studi terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Alam (2010); Sorrell (2010); Guo & Ma (2008); dan Basiago (1999) menjelaskan bahwa antara aktivitas pembangunan dan lingkungan terdapat fenomena

trade-off karena pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa kondisi lingkungan yang baik, demikian pula kualitas lingkungan tidak dapat dipertahankan di wilayah yang dihuni atau dieksploitasi secara intensif tanpa pembangunan.

Fenomena tersebut dapat dianalogikan ketika pembangunan ekonomi suatu negara masih belum berkembang, maka perhatian negara tersebut tertuju pada bagaimana meningkatkan pembangunan negara tersebut, baik melalui produksi, investasi, perdagangan internasional yang akan merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan lingkungan. Akibat dari pembangunan ekonomi tersebut juga diikuti oleh peningkatan indikator polusi sampai pada titik tertentu dan kemudian menurun kembali selama pembangunan yang terus berjalan. Konsep ini juga dikembangkan atas dasar permintaan akan kualitas lingkungan pada negara-negara maju melalui peningkatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang diikuti juga pengawasan sosial dan regulasi pemerintah sehingga masyarakat akan lebih sejahtera (Mason & Swanson, 2002).

Pada Gambar 1 mengilustrasikan bahwa pada tahap pertama, pembangunan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan degradasi lingkungan yang disebut sebagai *pre-industrial economies*, tahap kedua dikenal sebagai *industrial economies*, dan tahap ketiga, dikenal sebagai *post-industrial economics* (*service economy*). Industrialisasi berawal dari industri kecil dan kemudian bergerak ke industri berat. Pergerakan ini diasumsikan dapat meningkatkan penggunaan dan penglolaan sumber daya alam, yang pada akhirnya menyebabkan

penurunan kualitas lingkungan (degradasi lingkungan). Setelah itu industrialisasi dapat memperluas perannya pada pembentukan produk nasional domestik yang semakin stabil. Adanya investasi asing juga telah mendorong terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam meningkatkan perekonomian suatu negara secara langsung akan menyebabkan terjadinya peningkatan polusi di negara tersebut (Panayotou, 2003).

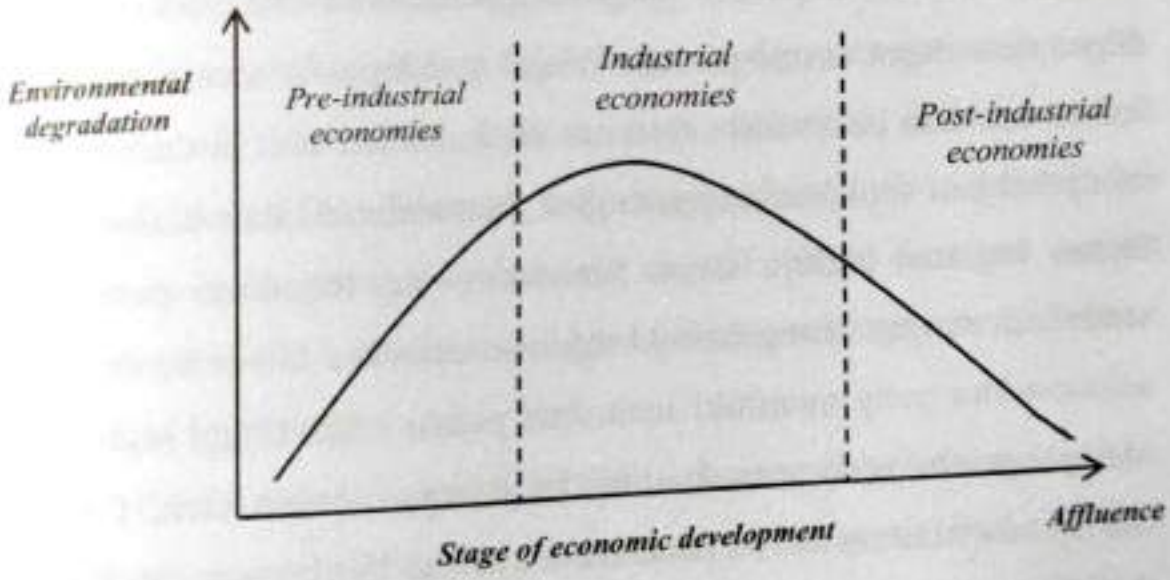

Gambar 3.1 Hubungan antara Degradasi Lingkungan dan Pembangunan

Sumber: Panayotou (2003)

Pada tahap berikutnya transformasi ekonomi terjadi berupa pergerakan dari sektor industri ke sektor jasa. Pergerakan ini diikuti oleh penurunan polusi yang sejalan dengan peningkatan pendapatan. Selain itu peningkatan permintaan kualitas lingkungan berjalan seiring

dengan peningkatan pendapatan. Pada gilirannya peningkatan pendapatan dapat diikuti oleh peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar kerugian lingkungan (*external cost*) yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi. Pendapat lain dari Andreoni & Levinson (2001) yang menyatakan bahwa pada tahap ini juga ditandai oleh timbulnya kemauan masyarakat untuk mengorbankan konsumsi barang lainnya demi terlindunginya lingkungan.

Selain itu, Panayotou (2003) juga menggambarkan adanya dampak skala pada polusi, yang mengendalikan dua efek lainnya, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pendapatan secara monoton karena semakin besar skala aktivitas ekonomi per unit di daerah akan menyebabkan semakin tinggi tingkat pencemaran, dan diasumsikan semua kegiatan lainnya sama. Sementara itu, terjadinya perubahan struktural dengan mengubah komposisi aktivitas ekonomi terhadap sektor-sektor yang memiliki intensitas polusi lebih tinggi juga dapat mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan. Lebih jauh, Pindyck (2013) menjelaskan bahwa penurunan kualitas lingkungan dan lainnya dapat mengakibatkan pasar yang tidak efisien karena menghambat produksi, menambah biaya marjinal dan membuat ketidakefisienan sosial dalam pasar, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (Eidelwein *et al.*, 2018)

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan diperkenalkan sebagai prioritas global dalam apa yang disebut "KTT Bumi", di Rio de Janeiro, pada tahun 1992. Kemudian, pada tahun 2002 dan 2012 sebagian besar negara di

dunia memperbarui komitmen mereka untuk mencapai keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar yaitu: (1) pembangunan ekonomi; (2) pembangunan sosial; dan (3) perlindungan lingkungan (United Nations, 2015). Konsep pembangunan berkelanjutan juga menjelaskan bahwa penduduk di suatu wilayah dapat bertindak sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Untuk memahami hubungan antara penduduk dengan lingkungan dapat diawali dari pertumbuhan penduduk, karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk resiko kerusakan lingkungan semakin besar, hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk, karena pada dasarnya manusia selalu memanfaatkan SDA. Dampak terhadap lingkungan bisa positif, dan negatif, namun faktanya dampak negatif lebih dominan karena pemanfaatkan SDA cenderung tidak bijaksana sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui partisipasi semua pihak. Secara umum pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya), yang mempunyai prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa yang akan datang (Brundtland, 1987). Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara-negara di dunia. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut setiap negara perlu melakukan perbaikan terhadap kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Secara umum, masalah lingkungan sering dikaitkan dengan proses pembangunan dan oleh karena itu dapat berdampak pada tingkat lokal, regional, maupun global. Beberapa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia ini telah menghancurkan konsekuensi terhadap lingkungan dan sangat berbahaya bagi manusia, hewan dan tumbuhan dan dapat diteruskan ke generasi mendatang (Chi, 1998; Kjellstrom & Mercado, 2008). Dalam menghadapi resesi ekonomi global, degradasi lingkungan merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan (Anbumozhi & Bauer, 2010).

Banyak laporan United Nations tentang pembangunan berkelanjutan, yang terakhir adalah laporan United Nations (2010), yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian individu lain, menganggap konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

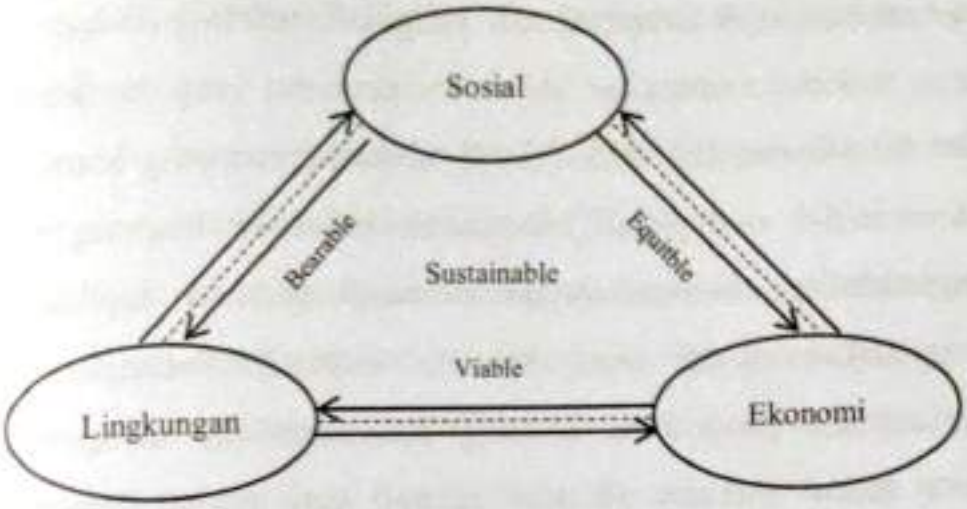

Gambar 3.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Stevens (2005)

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (Gambar 2). Sejalan dengan itu, dalam laporan United Nations (2010) menyebutkan ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual (Hedlund-de Witt, 2014; Ruttenberg, 2013). Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Secara konsep, pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan adalah konsep yang berbeda. Terdapat dua kriteria utama pembangunan berkelanjutan, (i) keberlanjutan yang lemah (*Weak*

Sustainability); (ii) keberlanjutan yang kuat (*Strong Sustainability*), kriteria tersebut merupakan ide dalam ekonomi yang dipelopori oleh Solow (1986) dan Hartwick (1977). Keberlajutan yang lemah (*Weak Sustainability*) merupakan ide dalam ekonomi lingkungan, yang mengasumsikan bahwa modal manusia (human capital) dapat menggantikan modal alam (*natural capital*). Sedangkan istilah keberlanjutan yang kuat (*Strong Sustainability*) mengasumsikan bahwa modal manusia (human capital) dan modal alam (*natural capital*) saling melengkapi, namun tidak dapat dipertukarkan. Dalam literatur ekonomi, kriteria pendekatan keberlanjutan yang lemah juga digunakan dalam studinya Amsalu *et al*. (2014) mengamati sumber daya yang langka dengan menggunakan alternatif.

Pemahaman terhadap elemen pembangunan berkelanjutan dapat dimasukkan sebagai input produktif. Input produktif inilah yang dapat digunakan dalam proses produksi, yang nantinya mendorong ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan dan secara luas input tersebut dapat dikategorikan sebagai; (i) tanah (semua sumber daya alam atau modal); (ii) tenaga kerja (energi, jam kerja, aspek modal manusia), dan (iii) modal (modal kerja dan nyata, modal keuangan, modal produksi, dan lain-lain.)

Menurut Seidler & Bawa (2010) sebagian besar ekonom neoklasik melihat hal tersebut, terutama yang mengadopsi fungsi produksi Cobb-Douglas yang terkenal pada tahun 1928, di mana dalam pemahamannya menganggap ada faktor substitusi dalam fungsi produksi (Felipe & Adams, 2005). Keterkaitan elemen pembangunan berkelanjutan ini dijelaskan kembali oleh Stevens (2005) seperti yang

disajikan pada Gambar 2, uraian elemen tersebut disajikan seperti berikut ini:

(1) Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap lingkungan (misalnya penggunaan sumber daya dan emisi CO_2).

(2) Jasa lingkungan untuk ekonomi (misalnya, sumber daya alam, kontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan lapangan kerja).

(3) Layanan lingkungan kepada masyarakat (misalnya, akses terhadap sumber daya dan fasilitas, kontribusi terhadap kondisi kesehatan, kehidupan dan kondisi kerja).

(4) Pengaruh variabel sosial terhadap lingkungan (misalnya, perubahan demografis, pola konsumsi, pendidikan lingkungan dan informasi, kerangka kelembagaan dan hukum).

(5) Pengaruh variabel sosial terhadap ekonomi (misalnya, angkatan kerja, populasi dan struktur rumah tangga, pendidikan dan pelatihan, tingkat konsumsi, kerangka kelembagaan dan hukum).

(6) Dampak aktivitas ekonomi terhadap masyarakat (misalnya, tingkat pendapatan, ekuitas, pekerjaan).

Berdasarkan pemahaman tersebut, terlihat bahwa peran modal manusia bersifat sakral bahkan bagi ekosistem untuk bertahan hidup, menghasilkan output ekonomi, dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dari pilar dan interaksi mereka seperti yang diamati sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi apapun.

Di sisi lain, terdapat juga istilah pembangunan hijau (*green development*), ini berbeda dengan pembangunan bekelanjutan, di

mana pembangunan hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya (Hu, 2017; Kasztelan, 2017). Pendukung pembangunan berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh di mana pemikiran mutakhir dari pembangunan hijau sulit diwujudkan.

Studi yang dilakukan oleh Basiago (1999) melihat adanya tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan, hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi pihak swasta (*private firms*) untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Di lain pihak, menurut Elliott (2006) dan Sexton *et al.* (2008) pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, di mana pandangan yang luas berada di bawah naungannya, konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekologi secara mendalam. Konsep yang berbeda juga menunjukkan adanya tarik ulur yang kuat antara ekonomi lingkungan dan antropologi. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya (Elliott, 2006; Sexton *et al.*, 2008). Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang dipahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan matrik dan indikator keberlanjutan.

Selain itu, populasi merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran populasi sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan.

Jumlah populasi yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah dapat memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen-komponen penduduk yang berkualitas, karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (Seidler & Bawa, 2010). Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

4. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Strategi dan kebijakan dalam mengejar pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan lingkungan ini sebenarnya masih relatif banyak. Berjalannya kebijakan secara baik tergantung dari inisiatif dan inovasi dari pembuat kebijakan yang mengarahkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, hal tersebut dapat berjalan baik melalui koordinasi antar pihak terkait dan meninjau secara rutin saat kebijakan pembangunan di implementasikan. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat menyeimbangkan keberadaan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Menurut Olson (1983) menjelaskan bahwa yang menjadi alasan dasar dari pembangunan berkelanjutan antara lain:

(1) Persoalan lingkungan merupakan hal yang saling terkait satu sama lain;

(2) Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan merupakan dua hal pokok yang saling berkaitan. Proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan mengawali integrasi yang terjadi antara lingkungan dan ekonomi;

(3) Pentingnya kerjasama dan komunikasi internasional diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem yang tidak mempedulikan batas-batas negara;

(4) Masalah ekonomi dan lingkungan juga berhubungan dengan faktor sosial dan politik.

Kebijakan pembangunan harus mengidentifikasi prioritas, hambatan, dan hambatan untuk melawan degradasi dan jika mungkin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tersebut. Menurut Salim (2010) konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penjelasan Salim (2010) yang menegaskan bahwa terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yakni:

(1) Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa.

(2) Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

(3) Mengedepankan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.

(4) Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.

Kebijakan perencanaan pembangunan yang baik perlu mengedepankan aspek lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, karena untuk mewujudkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperlukan beberapa hal yang harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan antara lain:

(1) Kebijakan perencanaan pembangunan dengan prinsip mencapai keseimbangan dinamis antara pemenuhan kebutuhan dan kelestarian lingkungan;

(2) Memperhatikan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan, dengan menekan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya;

(3) Eksploitasi sumber daya alam didasarkan pada prinsip keberlanjutan atau kelestarian lingkungan;

(4) Mendorong kebijakan politik lingkungan yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang;

(5) Memperhatikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. (2010). Globalization, Poverty and Environmental Degradation: Sustainable Development in Pakistan. *Journal of Sustainable Development*, *3*(3), 103–114. https://doi.org/10.5539/jsd.v3n3p103

Amsalu, D. W., Jacobsen, J. B., & Lundhede, T. H. (2014). Economic assessment of use values of near-natural forestry compared with rotational forestry in Denmark. *European Journal of Forest Research*, *133*(4), 611–622. https://doi.org/10.1007/s10342-014-0789-3

Anbumozhi, V., & Bauer, A. (2010). Impact of Global Recession on Sustainable Development and Poverty Linkages. In *Working Paper* (Issue 227, pp. 1–21). ADB Institute.

Andreoni, J., & Levinson, A. (2001). The simple analytics of the environmental Kuznets curve. *Journal of Public Economics*, *80*(2), 269–286. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00110-9

Basiago, A. D. (1999). Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice. *The Environmentalist*, *19*, 145–161. https://doi.org/10.1023/A:1006697118620

Brundtland, G. H. (1987). Report of the World Commision on Environement and Development: Our Common Future. In *Report of United Nations*. United Nations. https://doi.org/10.2307/2621529

Chi, A. (1998). Human interference and environmental instability:

addressing the environmental consequences of rapid urban growth in. *Environment and Urbanization*, *10*(2), 161–174. https://doi.org/10.1630/095624798101284527

Eidelwein, F., Cisco, D., Henrique, L., Pacheco, D., & Sartori, F. (2018). Internalization of environmental externalities: Development of a method for elaborating the statement of economic and environmental results. *Journal of Cleaner Production*, *170*, 1316–1327. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.208

Elliott, J. A. (2006). An introduction to sustainable development: The developing world. In J. A. Elliott (Ed.), *Routledge Taylor & Francis Group* (3rd Editio). Routledge Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.1016/S0743-0167(96)90049-2

Felipe, J., & Adams, G. F. (2005). A Theory of Production. The estimation of the Cobb-Douglas function: a retrospective view. *Eastern Economic Journal*, *31*(3), 427–445. https://doi.org/-

Guo, L., & Ma, H. (2008). Conflict between Developing Economic and Protecting Environment. *Journal of Sustainable Development*, *1*(3), 91–97.

Hartwick, J. M. (1977). Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources. *American Economic Review*, *67*(5), 972–974. https://doi.org/10.2307/1828079

Hedlund-de Witt, A. (2014). Rethinking sustainable development: Considering how different worldviews envision "development" and "quality of life." *Sustainability (Switzerland)*, *6*(11), 8310–8328. https://doi.org/10.3390/su6118310

PROFIL PENULIS

Prof. Bernadette Robiani, M.Sc
Lahir pada tanggal 16 Februari 1964
S1 : Universitas Sriwijaya (1987)
S2 : University of Murray (1987)
S3 : Universitas Padjajaran (2002)
Bidang Kajian Utama : Ekonomi Industri
Mengampu Mata : Ekonomi Industri I dan II, Ekonomi Skala Kecil, dan Ekonomi Makro

Dr. Azwardi, S.E., M.Si
lahir pada tanggal 18 Mei 1968
S1 : Universitas Sriwijaya
S2 : Universitas Syiahkuala (1998)
S3 : Universitas Padjajaran (2007)
Bidang Kajian Utama : Ekonomi Keuangan Daerah dan Regional
Mengampu Mata Kuliah Ekonomi Mikro dan Makro, Keuangan Daerah, Pembangunan dan KD, Dan Ekonomi Publik I dan II.
Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Sejak Tahun 2020- Sekarang

Dr. Suhel, S.E., M.Si
Lahir tangga 14 Oktober 1966
S1 : Universitas Jendral Soedirman (1991)
S2 : Universitas Syiahkuala (1998)
S3 : Universitas Padjajaran (2012)
Bidang Kajian Utama : Ekonomi Syariah
Mengampu Mata Kuliah Kewirausahaan, Ekonomi Skala Kecil, Ekonomi Industri dan Ekonomi Islam

Dr. Yunisvita, S.E., M.Si
Lahir pada tanggal 29 Juni 1970
S1 : Universitas Sriwijaya (1994)
S2 : Universitas Sriwijaya (2005)
S3 : Universitas Sriwijaya (2016)
Bidang Kajian Utama : Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan
Mengampu mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan I dan II, Analisis Pasar Tenaga Kerja, Statistik Ekonomi, dan Ekonomi Makro
Sebagai Pengelola Unit Penjamin Mutu FE Univsri

Dr. Muktdis, S.E., M.Si
Lahir tanggal 6 April 1973
S1 : Universitas Sriwijaya (1997)
S2 : Universitas Sriwijaya (2004)
S3 : Universitas Sriwijaya (2019)
Bidang Kajian Utama : Ekonomi Industri dan Agribisnis Mengampu Mata Kuliah Ekonomi Industri I Dan II dan Ekonomi Skala Kecil.
Sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya (2019-sekarang)

Dr. Sukanto, S.E., M.Si
lahir di pada tanggal
26 Maret 1974
S1 : Universitas Sriwijaya (2005)
S2 : Universitas Sriwijaya (2007)
S3 : Institut Pertanian Bogor (2019)
Bidang Kajian Utama : Ekonomi Regional
Mengampu Mata Kuliah Ekonomi Regional, Ekonomi Pedesaan, Ekonomi Publik dan Ekonomi Perkotaan. Sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Sejak Tahun 2019-sekarang

Imelda, S.E., M.S.E
lahir tanggal 9 Maret 1977
S1 : Universitas Sriwijaya (1995)
S2 : Universitas Indonesia (2003)
Bidang Kajian Utama : Ekonomi Regional dan Perkotaan
Mengampu Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan, Kebijakan Ekonomi Regional, Ekonomi Perkotaan, Ekonomi Regional dan Ekonomi SDAL. Sebagai Kepala Laboratorium Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Sejak Tahun 2019-Sekarang

Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si.
Lahir pada tanggal
12 Juni 1985
S1 Universitas Sriwijaya (2008)
S2 Universitas Sriwijaya (2011)
S3 Universitas Sriwijaya (2020)
Bidang Kajian Utama
Mengampu Mata Kuliah Ekonometrika, Ekonomi Publik, Ekonomi Keuangan Daerah, Ekonomi SDAL.Saat Ini Sebagai Co-editor In Chief di Jurnal Ekonomi Pembangunan, Dan Editor In Chief Di Jurnal Sricommerce

9 789795 879138